



2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



Inspektorat Kota Magelang



Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2
Magelang 56101



(0293) 363646



inspektoratmglkota@yahoo.com

Kata Pengantar

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kota Magelang telah menyusun LKjIP Tahun 2020 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Magelang, 19 Januari 2021
Plt. Inspektur Kota Magelang



GUNADI WIRAWAN, SH
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.19620704 199103 1 006

Ikhtisar Eksekutif

Inspektorat Kota Magelang sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintahan Kota Magelang dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kota Magelang secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Magelang tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kota Magelang **“Magelang Sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dilandasi Masyarakat Sejahtera dan Religius”** melalui misi ke satu (1) yaitu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-government* dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Dengan mendasarkan pada seluruh dokumen perencanaan Inspektorat Kota Magelang, Inspektorat Kota Magelang menetapkan 3 sasaran strategis beserta (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah dengan indicator Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan pengendalian Internal dengan indikator Penilaian Maturitas SPIP;
3. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan indikator Level Kapabilitas APIP.

Permasalahan/kendala dalam pencapaian sasaran antara lain;

1. Masih kurangnya jumlah auditor di Inspektorat Kota Magelang (mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP 971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); PermenPAN

Nomor 15 Tahun 2009 dan Lampiran Permendagri Nomor 47 Tahun 2010; serta PermenPAN dan RB Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;

2. Masih rendahnya kompetensi APIP (salah satu tolok ukur rendahnya kompetensi APIP adalah masih sedikitnya diklat/pelatihan/seminar yang diikuti dikarenakan proses pemberangkatan dan pembiayaan diklat harus melalui BKPP);
3. Masih adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK karena SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Adapun Strategi/upaya pemecahan masalah adalah meningkatkan peran APIP sebagai sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partners* untuk menunjang mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan aspiratif serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat; membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk meningkatkan sistem pelaporan dan capaian kinerja pengawasan dan keuangan; mengoptimalkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan untuk meningkatkan kapabilitas (APIP) Inspektorat Kota Magelang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan	1
C. Aspek Strategis Pengawasan	5
D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perjanjian Kinerja	7
B. Indikator Kinerja Utama	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	11
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	12
C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	13
D. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	14
E. Akuntabilitas Keuangan	20
F. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	23
G. Kinerja Lainnya	34
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	41

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Magelang Menurut Jabatan	3
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Magelang Menurut Golongan	3
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Magelang Menurut Jenjang Pendidikan dan Gender	4
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Penunjang Inspektorat Kota Magelang	4
Tabel 2.1 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020	9
Tabel 2.2 Ringkasan Anggaran Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020	10
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020	10
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Kota Magelang	12
Tabel 3.2 Hasil Perbandingan Capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020	13
Tabel 3.3 Capaian sasaran strategis Inspektorat Kota Magelang	13
Tabel 3.4 Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Kota Magelang	14
Tabel 3.5 Capaian sasaran strategis 2 Inspektorat Kota Magelang	16
Tabel 3.6 Hasil Penilaian SPIP	16
Tabel 3.7 Capaian sasaran strategis 3 Inspektorat Kota Magelang	18
Tabel 3.8 Hasil QA Kapabilitas APIP	18
Tabel 3.9 Laporan Realisasi Belanja Langsung Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2020	19
Tabel 3.10 Laporan Realisasi Belanja Langsung Per Program Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2020	22
Tabel 3.11 Perbandingan Anggaran TA 2019 dan 2020	22
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Program Inspektorat Kota Magelang	23
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Eselon III Inspektorat Tahun 2020	31
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Eselon IV Inspektorat Tahun 2020	32
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Tahun 2020	32
Tabel 3.16 Hasil Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018 dan 2019	35

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Magelang	2
Gambar 2.1 Penentuan sasaran dari RPJMD	8
Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Magelang	14
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Kota Magelang	31

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Sesuai dengan tujuan Inspektorat kota Magelang yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan aparatur yang berkualitas dan professional”, maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Magelang dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.

B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

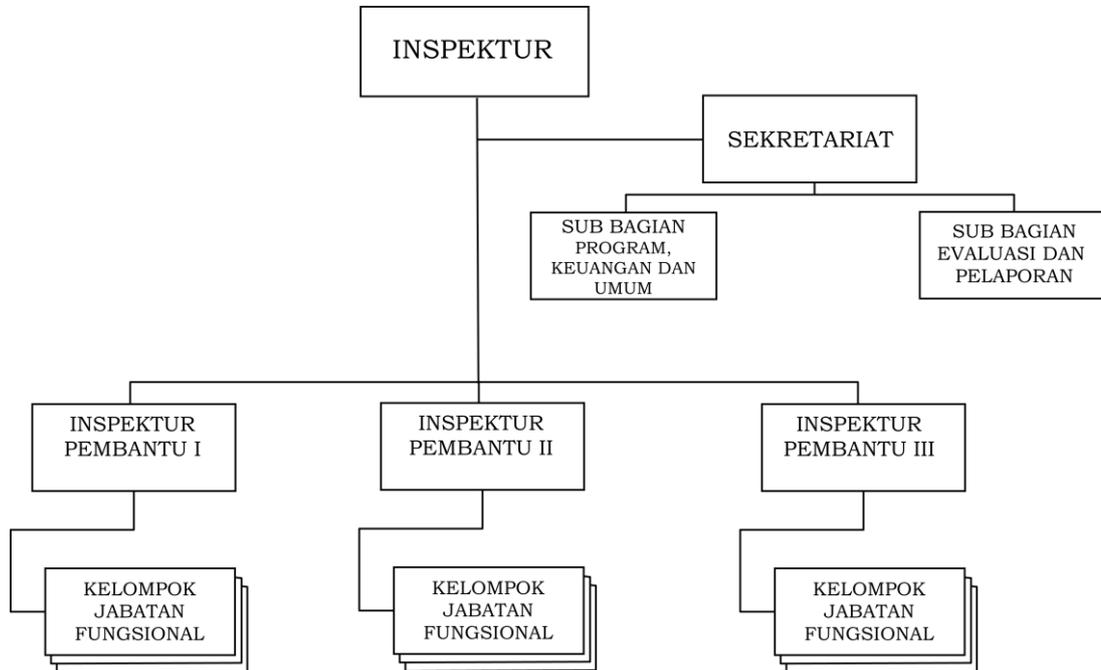
Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Magelang dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Inspektorat Kota Magelang.

Inspektorat Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Magelang



Sumber : Perda No. 3 tahun 2016

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Kota Magelang didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung sebagai berikut;

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Magelang Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jenjang	Jumlah	Jumlah Total
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III		4	4
3	Eselon IV		2	2
4	Fungsional Audiwan			11
		Auditor Kepegawaian Muda	1	
5	Fungsional P2UP			
		Pengawas Pemerintahan Muda	6	
		Pengawas Pemerintahan Madya	4	
6	Fungsional Auditor			8
		Auditor Terampil	1	
		Auditor Pertama	1	
		Auditor Penyelia	1	
		Auditor Muda	2	
		Auditor Madya	3	
7	Pelaksana			5
		JUMLAH TOTAL		31

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Magelang Menurut Golongan

No	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Golongan IVc	2	-	2
2	Golongan IVb	2	6	8
3	Golongan IVa	-	4	4
4	Golongan III d	6	2	8
5	Golongan III c	1	1	2
6	Golongan III b	-	3	3
7	Golongan III a	-	2	2
8	Golongan II d	-	-	-
9	Golongan II c	-	1	1
10	Golongan II b	-	-	-
11	Golongan II a	1	-	1
	JUMLAH	12	19	31

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Magelang
Menurut Jenjang Pendidikan dan Gender

No	Pendidikan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Magister/S-2	2	7	9
2	Sarjana/S-1	8	9	17
3	Sarjana Muda/DIII	1	1	2
4	SLTA	-	2	2
5	SLTP	1	-	1
	JUMLAH	12	19	31

Sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut;

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Penunjang Inspektorat Kota Magelang

No	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Nilai (Rp)
1	TANAH	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN	387	3.815.169.729
	a. Alat-alat besar	4	231.454.000
	b. Alat-alat angkutan	22	1.683.469.750
	c. Alat-alat bengkel dan ukur	5	8.276.500
	d. Alat-alat pertanian/peternakan	-	-
	e. Alat-alat kantor dan rumah tangga	258	1.099.338.019
	f. Alat-alat studio dan komunikasi	2	5.274.580
	g. Alat-alat kedokteran	-	-
	h. Alat-alat laboratorium	1	18.408.000
	i. Alat-alat komputer	95	768.948.880
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4	6.991.873.317
	a. Bangunan dan Gedung	4	6.991.873.317
	b. Monumen	-	-
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1	63.231.092
	a. Jalan dan jembatan	-	-
	b. Bangunan Air/Irigasi	-	-
	c. Instalasi	1	63.231.092
	d. Jaringan	-	-
5	ASET TETAP LAINNYA	48	18.830.500
	a. Buku perpustakaan	27	5.645.500
	b. Barang bercorak Kesenian/kebudayaan	-	-
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	21	13.185.000
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
	JUMLAH	440	10.889.104.638

C. Aspek Strategis Pengawasan

Peran Inspektorat Daerah adalah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian “Intern” Pemerintah.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, APIP mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015-2019;
4. Adanya komitmen pemimpin daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern;
5. Penguatan pengawasan sebagai bagian dari area perubahan dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010–2025.

D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kota Magelang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partners* belum optimal;
2. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum efektif;
3. Auditor dan P2PUD bersertifikat dari instansi/ lembaga berkompeten belum memadai;
4. Kurangnya kompetensi aparatur fungsional baik dari kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu :

1. Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP dengan adanya perubahan paradigma APIP dari *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partners*;
2. Kurang optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Kota Magelang.

BAB II

Perencanaan Kinerja

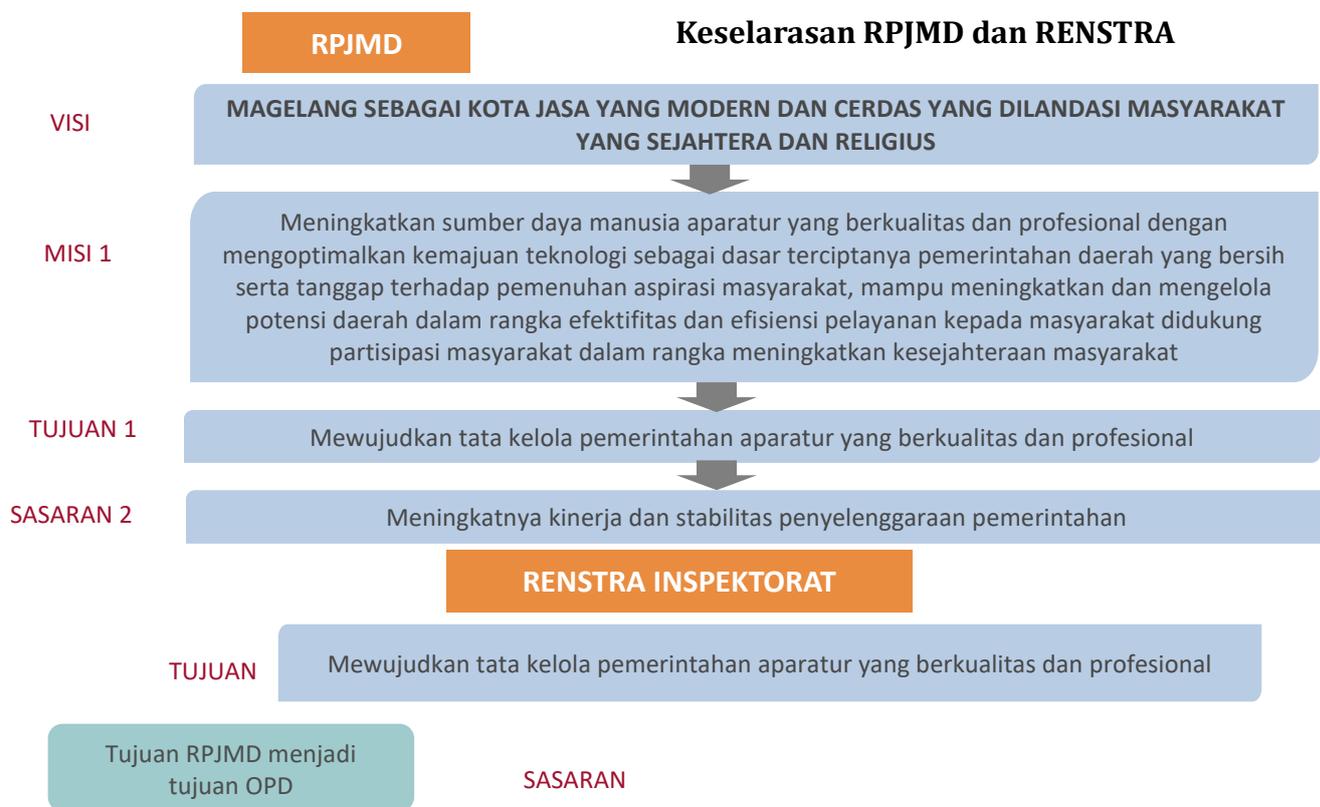
A. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Magelang yaitu “MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS” serta Misi Pertama Pemerintah Kota Magelang untuk “Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan aspiratif serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat”, Inspektorat Kota Magelang mempunyai komitmen untuk mendukung tujuan pertama yaitu meningkatnya kinerja dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran kedua yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan aparatur yang berkualitas dan professional.

Inspektorat Kota Magelang menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai komitmen untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Magelang.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Gambar 2.1
Penentuan sasaran dari RPJMD



Sasaran	Indikator	Target 2020
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
Peningkatan pengendalian internal	Penilaian Maturitas SPIP	3.5
Peningkatan level kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan acuan dari Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat. Pada Pertengahan Tahun 2020, Inspektorat melakukan perubahan terhadap perjanjian kinerja Inspektorat Kota Magelang dikarenakan adanya perubahan kebijakan di bidang keuangan daerah, yaitu Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020) dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Namun dengan adanya refocusing anggaran, Inspektorat tidak mengubah sasaran strategis dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Adapun hasil Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Magelang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP
2.	Peningkatan pengendalian Internal	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3.5
3.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3

Tabel 2.2

Ringkasan Anggaran Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020

URAIAN	DPA (Rp)	DPPA (Rp)
Belanja Tidak Langsung	Rp 3.680.699.000	Rp 3.689.571.000
Belanja Langsung	Rp 3.576.335.000	Rp 2.356.025.000
Jumlah	Rp 7.257.004.000	Rp 6.045.596.000

Pada awal tahun 2020, Inspektorat merencanakan anggaran sebesar Rp7.257.004.000,00, namun melalui mekanisme perubahan APBD serta adanya tambahan dana hibah pariwisata, total alokasi anggaran yang dianggarkan untuk mencapai sasaran strategis pada perjanjian kinerja 2020 Inspektorat Kota Magelang adalah sebesar Rp6.045.596.000,00 (mendukung 7 program dengan 53 kegiatan).

Tabel 2.3

Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp331.003.000
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp229.088.000
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp34.826.000
4	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp1.295.194.000
5	Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp217.373.000
6	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp91.370.000
7	Sinergitas penerapan sistem pengendalian internal	Rp131.363.000
		Rp2.330.217.000

B. Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Kota Magelang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Suplemen Perubahan Kedua Rencana Strategis Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Penilaian Maturitas SPIP;
- 3) Level Kapabilitas APIP.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut berdasarkan acuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017:

- 91 s/d 100 : Sangat Baik
- 76 s/d <90 : Tinggi
- 66 s/d <75 : Sedang
- 51 s/d <65 : Rendah
- 0 s/d <50 : Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja Inspektorat Kota Magelang adalah dengan mengukur capaian antara target kinerja dan realisasi kinerja. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Magelang adalah dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.1

Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
1.	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100%
2.	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3.5	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	88%
3.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
RATA-RATA CAPAIAN					96%

Hasil capaian rata-rata pengukuran indikator kinerja utama tahun 2020 adalah sebesar 96%

Tabel 3.2
Hasil Perbandingan Capaian kinerja dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	5	5	6
1.	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	1,163	3.08	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)
3.	Level Kapabilitas APIP	Level	1	3 dengan catatan	3 dengan catatan	3	3

Perbandingan capaian kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Magelang menunjukkan peningkatan selama beberapa tahun terakhir.

C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja untuk tahun 2020, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian sasaran strategis Inspektorat Kota Magelang

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	Predikat
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	1	100%	Sangat baik
2	Peningkatan pengendalian Internal	1	88%	Tinggi
3	Peningkatan Kapabilitas APIP	1	100%	Sangat baik

D. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1 :

“Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah “

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat *sangat baik*.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

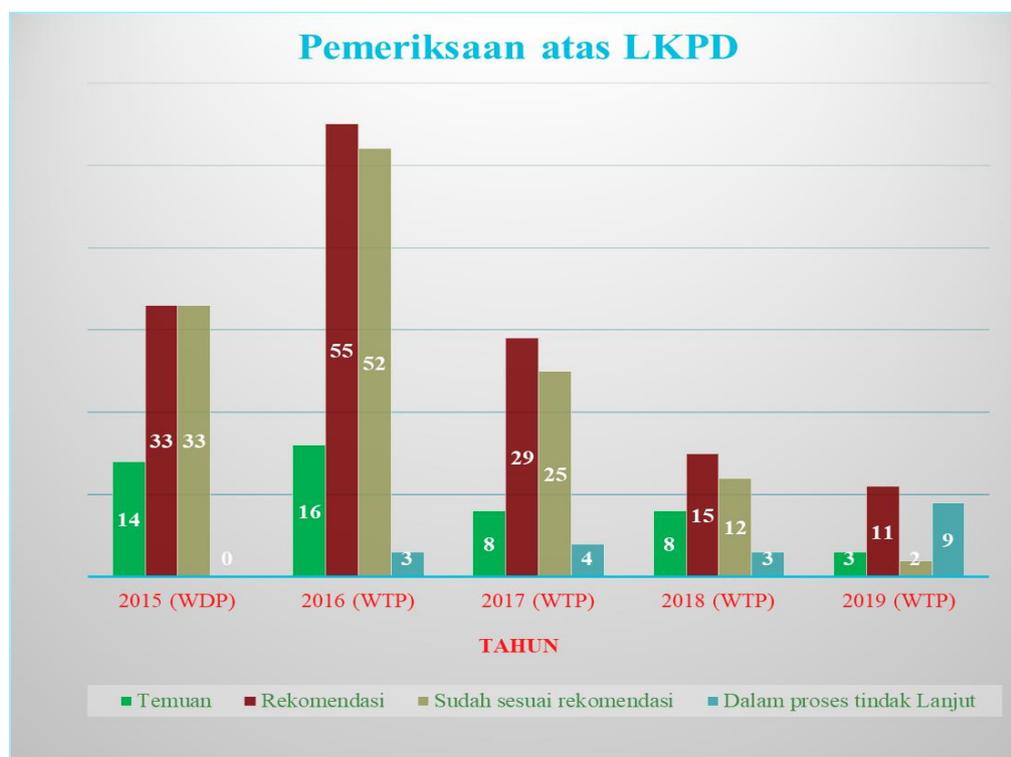
Tabel 3.4

Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
1.	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100%

Gambar 3.1

Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Magelang



Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD TA 2019 adalah jumlah keseluruhan 3 temuan yang terdiri dari 11 rekomendasi, masih ada 9 rekomendasi yang belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut. Oleh karena itu perlu upaya secara signifikan untuk mempertahankan pencapaian opini WTP ini.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 1 adalah;

1. OPD/obrik masih kurang memahami untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan;
2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan:

1. Mengoptimalkan perbaikan perencanaan dengan melakukan cascade down agar program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1, didukung oleh pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan realisasi sumber daya keuangan sebesar 96,36% (program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH) dan 99,98% (program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan) dari total pagu. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 3,64% dan 0,02% dari Pagu yang ditentukan.

Sasaran 2 :**“Peningkatan pengendalian Internal “**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran peningkatan pengendalian internal dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 88% dengan predikat *tinggi*. Sasaran ini masih menggunakan hasil evaluasi SPIP tahun 2017, karena Inspektorat Kota Magelang tidak mendapatkan evaluasi SPIP dari BPKP, sehingga masih menggunakan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tahun 2017.

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.5

Capaian sasaran strategis 2 Inspektorat Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
2.	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3.5	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	88%

Kesimpulan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Magelang adalah Level 3 (terdefinisi) dengan skor 3,038 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6

Hasil Penilaian SPIP

No	Unsur-unsur SPIP	Hasil Penilaian		
		Nilai	Bobot	Skor
1	Lingkungan Pengendalian	3,000	30,00%	0,938
2	Penilaian Resiko	3,000	20,00%	0,600
3	Kegiatan Pengendalian	3,000	25,00%	0,750
4	Informasi dan Komunikasi	3,000	10,00%	0,300
5	Pemantauan	3,000	15,00%	0,450
		3,000	100,00%	3,038

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut, maka Inspektorat Kota Magelang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar resiko dan rencana tindak pengendalian;
- 2) Melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas kebijakan dan implementasi serta menindaklanjuti saran atau hasil evaluasi tersebut;
- 3) Menyelenggarakan penyelenggaraan SPIP dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 2 adalah;

1. Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal;
2. Dokumen SOP belum memadai
3. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum dilaksanakan dengan baik

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Kota Magelang untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2, didukung oleh pelaksanaan Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal serta Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan realisasi sumber daya keuangan sebesar 97,94% (Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal) dan 97,31% (program Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan) dari total pagu. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar 2,06% dan 2,69% dari Pagu yang ditentukan.

Sasaran 3 :

“Peningkatan Kapabilitas APIP “

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran peningkatan kapabilitas APIP dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat *Sangat Baik*. Hasil

pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian sasaran strategis 3 Inspektorat Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
3.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%

Dari hasil *Quality Assurance* menyimpulkan bahwa inspektorat Kota Magelang telah berada pada Level 3 untuk semua elemen sebagai berikut:

Tabel 3.8

Hasil QA Kapabilitas APIP

No	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan sumber daya manusia	3
3	Praktik profesional	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut, maka Inspektorat Kota Magelang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan kematangan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektifitas pengelolaan resiko pemerintah daerah;
2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan *Key Process Area* (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mempersiapkan untuk level kapabilitas yang lebih tinggi;
3. Melakukan *Self Assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 3 adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas APIP yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas masih tergolong rendah. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi fungsional pengawas, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), serta menambah jumlah pegawai pada Inspektorat Kota Magelang dengan penerimaan CPNS maupun mutasi pegawai.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3, didukung oleh pelaksanaan Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan realisasi keuangan sebesar 94,80%, Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan realisasi keuangan sebesar 96,97%, serta Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan realisasi keuangan sebesar 98,61%, Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar 5,20%, 3,03% dan 1,39% dari Pagu yang ditentukan.

E. Akuntabilitas Keuangan

Aspek keuangan sebagai unsur penunjang dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2020. Adapun perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Laporan Realisasi Belanja Langsung Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2020

No.	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
			Rp.	%	Target	%
1	3	4	5	6	7	8
	Inspektorat	2.356.025.000	2.275.561.286	96,58%	100,00%	100,00%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	2.725.500	90,85%	100,00%	100,00%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	64.600.000	58.114.644	89,96%	100,00%	100,00%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.074.000	7.016.000	53,66%	100,00%	100,00%
4	Penyediaan jasa administrasi	66.483.000	65.649.800	98,75%	100,00%	100,00%

	keuangan					
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.176.000	55.850.869	96,00%	100,00%	100,00%
6	Penyediaan alat tulis kantor	11.513.000	11.512.500	100,00%	100,00%	100,00%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.790.000	12.790.000	100,00%	100,00%	100,00%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.439.000	3.427.900	99,68%	100,00%	100,00%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.730.000	1.728.000	99,88%	100,00%	100,00%
10	Penyediaan bahan logistik kantor	900.000	899.000	99,89%	100,00%	100,00%
11	Penyediaan makanan dan minuman	40.890.000	40.887.659	99,99%	100,00%	100,00%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.000.000	29.940.389	99,80%	100,00%	100,00%
13	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	24.408.000	23.245.512	95,24%	100,00%	100,00%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75.000.000	74.843.000	99,79%	100,00%	100,00%
15	Pengadaan mebeleur	55.658.000	55.373.000	99,49%	100,00%	100,00%
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.393.000	4.371.000	99,50%	100,00%	100,00%
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66.745.000	60.258.469	90,28%	100,00%	100,00%
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.500.000	3.500.000	100,00%	100,00%	100,00%
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.792.000	20.792.000	100,00%	100,00%	100,00%
20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000	3.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.653.000	10.653.000	100,00%	100,00%	100,00%
22	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.950.000	1.950.000	100,00%	100,00%	100,00%
23	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.446.000	3.443.300	99,92%	100,00%	100,00%
24	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.398.000	5.398.000	100,00%	100,00%	100,00%
25	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	9.995.000	9.993.400	99,98%	100,00%	100,00%
26	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.384.000	3.382.100	99,94%	100,00%	100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH						
27	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	251.490.000	228.162.393	90,72%	100,00%	100,00%
28	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	88.449.000	81.649.000	92,31%	100,00%	100,00%
29	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	212.998.000	212.996.800	100,00%	100,00%	100,00%
30	Review Laporan Keuangan	52.102.000	52.026.000	99,85%	100,00%	100,00%

31	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	42.065.000	39.919.486	94,90%	100,00%	100,00%
32	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	14.831.000	14.131.000	95,28%	100,00%	100,00%
33	Penyelesaian Kerugian Negara	66.511.000	66.511.000	100,00%	100,00%	100,00%
34	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	72.218.000	68.167.586	94,39%	100,00%	100,00%
35	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	25.366.000	22.651.000	89,30%	100,00%	100,00%
36	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	123.055.000	123.050.577	100,00%	100,00%	100,00%
37	Evaluasi LKjIP	38.925.000	36.025.000	92,55%	100,00%	100,00%
38	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	11.387.000	11.387.000	100,00%	100,00%	100,00%
39	Fasilitasi Kerjasama APIP - APH	164.508.000	164.337.879	99,90%	100,00%	100,00%
40	Survei Penilaian Integritas (SPI)	495.000	495.000	100,00%	100,00%	100,00%
41	Review Dana Alokasi Khusus	64.386.000	59.181.000	91,92%	100,00%	100,00%
42	Pelaksanaan Pengawasan Probit Audit	92.216.000	92.202.000	99,98%	100,00%	100,00%
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan						
43	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	14.765.000	14.165.000	95,94%	100,00%	100,00%
44	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	152.108.000	151.297.023	99,47%	100,00%	100,00%
45	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	50.500.000	48.900.000	96,83%	100,00%	100,00%
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan						
46	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	17.480.000	15.879.500	90,84%	100,00%	100,00%
47	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35.150.000	35.025.000	99,64%	100,00%	100,00%
48	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	38.740.000	38.006.000	98,11%	100,00%	100,00%
Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal						
49	Inventarisasi Temuan Pengawasan	10.185.000	10.184.000	99,99%	100,00%	100,00%
50	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	83.850.000	82.239.000	98,08%	100,00%	100,00%
51	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	37.328.000	36.228.000	97,05%	100,00%	100,00%
TOTAL		2.356.025.000	2.275.561.286	96,58%	100,00%	100,00%

Tabel 3.10

Laporan Realisasi Belanja Langsung Per Program
Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2020

INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Realisasi	Efisiensi
Pelayanan administrasi perkantoran	331.003.000	313.787.773	94,80%	5,20%
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	229.088.000	222.137.469	96,97%	3,03%
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34.826.000	34.819.800	99,98%	0,02%
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.321.002.000	1.272.892.721	96,36%	3,64%
Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	217.373.000	214.362.023	98,61%	1,39%
Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	91.370.000	88.910.500	97,31%	2,69%
Sinergitas penerapan sistem pengendalian internal	131.363.000	128.651.000	97,94%	2,06%

Analisis efisiensi sumber daya yang telah dilakukan untuk alokasi anggaran kegiatan dan program utama (pengawasan) pada tahun anggaran 2020 adalah dilakukannya *refocusing* program dan *refocusing* anggaran sehingga anggaran tepat sasaran.

Tabel 3.11

Perbandingan Anggaran TA 2019 dan 2020

Tahun	2019	2020
Jumlah program dan kegiatan	4 program 23 kegiatan	4 program 25 kegiatan
Alokasi Anggaran untuk kegiatan pengawasan	Rp 2.259.732.000,00	Rp 1.761.108.000

Penambahan kegiatan pada tahun 2020 dimaksudkan untuk:

1. Survei Penilaian Integritas (SPI) karena adanya mandatory baru dari pusat yang harus dilaksanakan.
2. Probit Audit.

F. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kota Magelang, telah dirumuskan tujuh (7) program dengan indikator keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan serta hasil evaluasi rencana aksi program sebagai berikut:

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Program Inspektorat Kota Magelang

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas pengelolaan perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	100
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Prosentase Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	100
Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Meningkatnya pelaksanaan RB pada koponen pengukit dan hasil	Indek RB	Nilai	66	66,33
Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Peningkatan kompetensi Sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/Workshop substansi	%	100	100
Sinergitas penerapan sistem pengendalian internal	Meningkatkan perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Persentase Implementasi SPIP	%	86	89,66

1. Sasaran Program pelayanan administrasi perkantoran adalah meningkatnya kualitas pengelolaan perkantoran dengan indikator pencapaian sasaran persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100%. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator pencapaian

sasaran adalah terpenuhinya kegiatan administrasi surat menyurat perkantoran selama 1 tahun.

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator pencapaian sasaran terpenuhinya biaya langganan internet, air dan listrik selama 12 bulan
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan indikator pencapaian sasaran terpenuhinya biaya perpanjangan pajak kendaraan dinas sebanyak 22 unit.
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan indikator pencapaian sasaran terpenuhinya tertib pengelolaan administrasi keuangan selama 12 kali.
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya sarana dan prasarana kebersihan kantor sebanyak 15 jenis.
- f. Penyediaan alat tulis kantor dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya kebutuhan alat tulis kantor sebanyak 15 jenis.
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 3 jenis.
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan sebanyak 7 jenis
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya bahan bacaan sebanyak 3 jenis.
- j. Penyediaan bahan logistik kantor dengan indikator pencapaian sasaran terpenuhinya pengisian tabung gas sebanyak 6 kali.
- k. Penyediaan makanan dan minuman dengan indikator pencapaian sasaran terpenuhinya jamuan makanan dan minuman untuk tamu dan pegawai serta jamuan rapat sebanyak 22 kegiatan.

1. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan indikator pencapaian sasaran terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 5 kegiatan.
- m. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya jasa penjamal kantor sebanyak 1 orang.

Program pelayanan administrasi perkantoran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

2. Sasaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah meningkatnya kualitas pengelolaan perkantoran dengan indikator pencapaian sasaran persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor sebesar 100%. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
 - a. Pembangunan gedung kantor dengan indikator pencapaian sasaran pengadaan taman kantor dilakukan perubahan karena realokasi anggaran.
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan indikator pencapaian sasaran terlaksananya pengadaan AC sebanyak 4 unit.
 - c. Pengadaan mebeleur dengan indikator pencapaian sasaran terlaksananya pembelian mebel kantor sebanyak 8 unit.
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan.
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional kantor sebanyak 22 unit.
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya perlengkapan gedung kantor sebanyak 6 buah.

- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya peralatan gedung kantor sejumlah 3 jenis.
- h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya mebeleur kantor sebanyak 3 jenis.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

- 3. Sasaran Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator pencapaian sasaran tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan secara tepat waktu. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Capaian Kinerja sebanyak 4 laporan.
 - b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 laporan.
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan akhir tahun sebanyak 1 laporan.
 - d. Penyusunan Rencana Kerja OPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya renja sebanyak 2 dokumen.
 - e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya RKA dan RKAP sebanyak 2 dokumen.
 - f. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) OPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya LKjIP sebanyak 1 dokumen.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

4. Sasaran Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH adalah meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan dengan indikator pencapaian sasaran prosentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D sebesar 100%. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
 - a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan indikator pencapaian sasaran obyek pemeriksaan yang diperiksa sebanyak 30 obrik.
 - b. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dengan indikator pencapaian sasaran obyek pemeriksaan yang diperiksa sebanyak 10 obrik.
 - c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan indikator pencapaian sasaran jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sebanyak 450 rekomen
 - d. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dengan indikator pencapaian sasaran gelar pengawasan daerah dilakukan perubahan karena realokasi anggaran.
 - e. Review Laporan Keuangan dengan indikator pencapaian sasaran jumlah reuiu laporan keuangan sebnayak 2 kegiatan.
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan kegiatan monev PPK sebanyak 4 laporan.
 - g. Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN) dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya

laporan hasil pemantauan LKHASN sebanyak 2 laporan.

- h. Penyelesaian Kerugian Negara dengan indikator pencapaian sasaran terlaksananya kegiatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebanyak 2 kegiatan.
- i. Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan hasil reuiu RKPD, RKA dan RKAP sebanyak 3 laporan.
- j. Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran dengan indikator pencapaian sasaran terlaksananya reuiu PBJ sebanyak 2 kegiatan.
- k. Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar dengan indikator pencapaian sasaran terlaksananya kegiatan saber pungli sebanyak 2 kegiatan.
- l. Evaluasi LKJiP dengan indikator pencapaian sasaran terlaksananya evaluasi LKJiP sebanyak 2 kegiatan
- m. Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan ILHPS sebanyak 2 laporan.
- n. Fasilitasi Kerjasama APIP – APH dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan kerjasama APIP-APH sebanyak 4 laporan.
- o. Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan SPI sebanyak 1 laporan.
- p. Review Dana Alokasi Khusus dengan indikator pencapaian sasaran terlaksananya reuiu DAK sebanyak 3 kegiatan.
- q. Pelaksanaan Pengawasan Probitiy Audit dengan indikator pencapaian sasaran terlaksananya probity audit sebanyak 10 kegiatan.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

5. Sasaran Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan adalah meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada komponen pengungkit dan hasil dengan indikator pencapaian sasaran Indek RB dengan nilai 66,33. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
 - a. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan indikator pencapaian sasaran tersusunya sisdur pengawasan sebanyak 3 dokumen.
 - b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan indikator pencapaian sasaran tesusunnya laporan kegiatan PMPRB sebanyak 2 laporan.
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi gratifikasi sebanyak 4 laporan.

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

6. Sasaran Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan adalah peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dengan indikator pencapaian sasaran persentase aparatur yang mengikuti diklat/workshop subtansi sebesar 100%. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
 - a. Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan PAK auditor sebanyak 34 laporan.
 - b. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator pencapaian sasaran Level Kapabilitas APIP level 3.
 - c. Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan dengan indikator

pencapaian sasaran tersusnnya laporan kegiatan Quality Assurance sebanyak 4 laporan.

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

7. Sasaran Program Sinergitas penerapan sistem pengendalian internal adalah meningkatkan perangkat daerah yang menerapkan SPIP dengan indikator pencapaian sasaran persentase implementasi SPIP sebesar 89,66%. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
 - a. Inventarisasi Temuan Pengawasan dengan indikator pencapaian sasaran terlaksananya kegiatan pengelolaan hasil pemeriksaan sebanyak 1 kegiatan.
 - b. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan terlaksananya sinkronisasi tindak lanjut pengawasan sebanyak 4 kegiatan.
 - c. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan sosialisasi dan assement penerapan SPIP sebanyak 2 laporan.

Program Sinergitas penerapan sistem pengendalian internal memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

Dalam implementasi perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Inspektorat telah berupaya untuk dapat menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan menyusun pohon kinerja dan membangun komitmen dari kepala hingga staf dimana skema pohon kinerja adalah mencari atau menentukan akar permasalahan, kemudian diselesaikan secara

kolektif oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Berikut ini adalah skema pohon kinerja Inspektorat Kota Magelang;

Gambar 3.2

Pohon Kinerja Inspektorat Kota Magelang



Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja Eselon III Inspektorat Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun an	Tahun 2020		
					Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
1	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor.	%	100	100	100	100

3	Meningkatnya pelaksanaan RB pada komponen pengukit dan hasil	Indeks RB	NILAI	66	100	66,33	100
4	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	100	100	100
5	Peningkatan kompetensi Sumber daya aparatur	Persentase terlaksananya Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	%	100	100	100	100
6	Meningkatkan perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Persentase Implementasi SPIP	%	86	86	89,66	100

Tabel 3.14

Capaian Indikator Kinerja Eselon IV Inspektorat Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun an	Tahun 2020		
					Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
1	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor.	%	100	100	100	100
2	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
3	Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	88	88	95,5	100
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	95	95	100	100
4	Meningkatnya pelaksanaan RB pada komponen pengukit dan hasil	Indeks RB	NILAI	66	66	66,33	100

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Tahun 2020

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja	
			Vol	Satuan
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	331.003.000,00	313.787.773,00		
Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	2.725.500,00	1	tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	64.600.000,00	58.114.644,00	12	bulan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.074.000,00	7.016.000,00	22	unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan	66.483.000,00	65.649.800,00	12	kali
Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.176.000,00	55.850.869,00	15	jenis
Penyediaan alat tulis kantor	11.513.000,00	11.512.500,00	15	jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.790.000,00	12.790.000,00	3	jenis
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.439.000,00	3.427.900,00	7	jenis
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.730.000,00	1.728.000,00	3	jenis
Penyediaan bahan logistik kantor	900.000,00	899.000,00	6	kali
Penyediaan makanan dan minuman	40.890.000,00	40.887.659,00	22	kegiatan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.000.000,00	29.940.389,00	5	kegiatan
Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	24.408.000,00	23.245.512,00	1	orang
<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	229.088.000,00	222.137.469,00		
Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	0	unit
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75.000.000,00	74.843.000,00	4	unit
Pengadaan mebeleur	55.658.000,00	55.373.000,00	8	unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.393.000,00	4.371.000,00	12	bulan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66.745.000,00	60.258.469,00	22	unit
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	6	buah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.792.000,00	20.792.000,00	3	jenis
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000,00	3.000.000,00	3	jenis
<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	34.826.000,00	34.819.800,00		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	10.653.000,00	10.653.000,00	4	laporan
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1.950.000,00	1.950.000,00	1	laporan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.446.000,00	3.443.300,00	1	laporan
Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.398.000,00	5.398.000,00	2	dokumen
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	9.995.000,00	9.993.400,00	2	dokumen
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	3.384.000,00	3.382.100,00	1	dokumen
<i>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</i>	1.295.194.000,00	1.272.892.721,00		
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	225.682.000,00	228.162.393,00	30	obrik
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	88.449.000,00	81.649.000,00	10	obrik
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	212.998.000,00	212.996.800,00	450	rekomendasi
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	0,00	0,00	0	kegiatan
Review Laporan Keuangan	52.102.000,00	52.026.000,00	2	kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	42.065.000,00	39.919.486,00	4	laporan
Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	14.831.000,00	14.131.000,00	2	kegiatan
Penyelesaian Kerugian Negara	66.511.000,00	66.511.000,00	2	laporan
Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	72.218.000,00	68.167.586,00	3	laporan
Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	25.366.000,00	22.651.000,00	2	kegiatan
Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	123.055.000,00	123.050.577,00	2	kegiatan
Evaluasi LKjIP	38.925.000,00	36.025.000,00	2	kegiatan
Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	11.387.000,00	11.387.000,00	2	laporan

Fasilitasi Kerjasama APIP - APH	164.508.000,00	164.337.879,00	4	laporan
Survei Penilaian Integritas (SPI)	495.000,00	495.000,00	1	laporan
Review Dana Alokasi Khusus	64.386.000,00	59.181.000,00	3	kegiatan
Pelaksanaan Pengawasan Probity Audit	92.216.000,00	92.202.000,00	10	kegiatan
<i>Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</i>	217.373.000,00	214.362.023,00		
Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	14.765.000,00	14.165.000,00	34	laporan
Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	152.108.000,00	151.297.023,00	3	level
Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	50.500.000,00	48.900.000,00	12	laporan
<i>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</i>	91.370.000,00	88.910.500,00		
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	17.480.000,00	15.879.500,00	3	dokumen
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35.150.000,00	35.025.000,00	2	laporan
Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	38.740.000,00	38.006.000,00	4	laporan
<i>Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal</i>	131.363.000,00	128.651.000,00		
Inventarisasi Temuan Pengawasan	10.185.000,00	10.184.000,00	1	kegiatan
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	83.850.000,00	82.239.000,00	4	kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	37.328.000,00	36.228.000,00	2	laporan

G. Kinerja Lainnya

Inspektorat Kota Magelang mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang meliputi:

1. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Adapun jumlah Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah 25 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dengan nilai rata-rata 69,58 (Baik).

2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Selama Tahun 2020, Inspektorat Kota Magelang telah menerima penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus/kasus dengan berbagai macam substansi pengaduan diantaranya Potensi Kerugian daerah, Indikasi Korupsi ataupun Indisipliner.

3. LHKPN

Pemerintah Kota Magelang telah melaporkan 100 persen kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2020.

4. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Tabel 3.16

Hasil Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	KOMPONEN PENGUNGKIT			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,43	2,56
2	Penataan Peraturan perundang-undangan	5,00	2,09	2,15
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,68	2,83
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,37	3,45
5	Penataan Sistem manajemen SDM	15,00	11,26	11,42
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,62	3,71
7	Penguatan Pengawasan	12,00	4,64	4,93
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,79	3,81
	TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT	60,00	33,88	34,86
B	KOMPONEN HASIL			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,41	9,11
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,79	4,99
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,07	5,92
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,60	8,45
	TOTAL KOMPONEN HASIL	40,00	30,87	31,47
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	100,00	64,75	66,33

Merupakan salah satu alat untuk mengukur perkembangan Reformasi Birokrasi disuatu daerah berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB-RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Reformasi Birokrasi. Adapun penilaiannya menggunakan perbandingan Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-Undangan, Penataan & Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) dibandingkan dengan Nilai Komponen Hasil (Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan Kualitas Pelayanan Publik). Berdasarkan hasil review Tim Penilai Nasional atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Magelang memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 66,33 (Baik) kategori “B” dan pada tahun 2019. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang semakin membaik.

5. Pemberian *reward and punishment* melalui pemilihan APIP berprestasi

Teknik Penilaian ASN berprestasi menggunakan metode penilaian 360^o dimana kinerja pegawai dinilai berdasarkan umpan balik dari setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengannya baik oleh atasan, rekan kerja, mitra, anak buah, maupun pelanggan. ASN yang memperoleh nilai tertinggi diberikan *reward* berupa piagam penghargaan, diumumkan pada *website* serta papan pengumuman serta diberikan hadiah sumbangan tidak mengikat. APIP berprestasi juga diberikan kesempatan untuk pengembangan diri melalui penugasan.

6. Tindak Lanjut atas MCP Korsupgah

Atas ketujuh indicator program MCP Korsupgah, masing-masing pokja telah melakukan koordinasi dalam pengisian 38 indikator yang terdiri dari 103 sub indikator MCP Korsupgah. Data Pendukung dari masing-masing sub indikator telah diunggah oleh

Admin MCP Korsupgah dan akan melengkapi kekurangan data pendukung indikator yang telah diverifikasi oleh Tim Korwil VII Korsupgah KPK.

BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Magelang tahun 2020 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Magelang tahun 2020 dengan 3 (empat) sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah” dengan kategori Sangat Baik.
2. Pencapaian sasaran strategis “Peningkatan pengendalian Internal” dengan kategori Tinggi
3. Pencapaian sasaran strategis “Peningkatan Kapabilitas APIP “dengan kategori Sangat Baik.

Permasalahan/Kendala Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Kota Magelang tahun 2020 antara lain :

1. Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal;
2. OPD/obrik masih kurang memahami untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan;
3. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;

4. Belum optimalnya hasil pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Online (SIMWAS Online);
5. Belum terintegrasinya Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
6. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas;
7. Masih kurangnya jumlah pegawai khususnya Auditor di Inspektorat Kota Magelang.

Rekomendasi Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Magelang di masa mendatang antara lain :

1. Perbaiki perencanaan dengan melakukan *cascade down* agar program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan agar terjadi progres peningkatan pencapaian kualitas LKPD;
3. Menambah intensitas pelaksanaan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
4. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-WAS) guna percepatan penyelesaian tindak lanjut;
5. Menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi fungsional pengawas;
6. Menambah jumlah APIP dengan jalur penerimaan CPNS, mutasi pegawai atau inpassing;
7. Melaksanakan langkah perbaikan sesuai rencana tindak yang diperlukan dalam rangka percepatan peningkatan kapabilitas APIP.
8. Penguatan peran agent of change melalui pembinaan serta pemantauan pelaksanaan tugas agen bagi perubahan di unit kerja masing-masing.
9. Menetapkan quick wins dengan output yang jelas dan berdampak terhadap kinerja organisasi.

Adapun dampak lain dari pencapaian sasaran utama dalam mendukung Inspektorat adalah mendukung Reformasi Birokrasi yaitu;

1. Mempertahankan Opini WTP
2. Meningkatkan Kapabilitas APIP
3. Meningkatkan Maturitas SPIP
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
5. Penilaian Mandiri dan Monev RB

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Magelang, 19 Januari 2021

Plt. INSPEKTUR KOTA MAGELANG
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA MAGELANG



GUNADI WIRAWAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620704 199103 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNADI WIRAWAN
Jabatan : Plt.INSPEKTUR KOTA MAGELANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

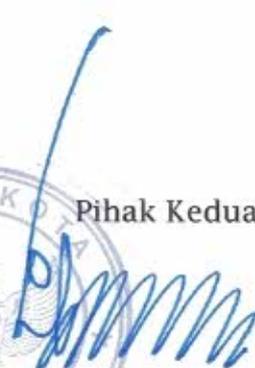
Nama : SIGIT WIDYONINDITO
Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 1 Oktober 2020

Pihak Kedua,

SIGIT WIDYONINDITO

Pihak Pertama,

GUNADI WIRAWAN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP
2.	Peningkatan pengendalian Internal	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3.5
3.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3

Program :	Anggaran :	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 331,003,000	APBD
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 229,088,000	APBD
3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 34,826,000	APBD
4 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp 1,295,194,000	APBD
5 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp 217,373,000	APBD
6 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp 91,370,000	APBD
7 Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal	Rp 131,363,000	APBD
JUMLAH	Rp 2,330,217,000	


 WALIKOTA MAGELANG

 SIGIT WIDYONINDITO

Magelang, 1 Oktober 2020
 INSPEKTUR KOTA MAGELANG


 GUNADI WIRAWAN